

**AKSI TERORISME DI FILIPINA SELATAN DAN  
STABILITAS KEAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR DI  
PERBATASAN FILIPINA-INDONESIA**

**Oleh: Poltak Partogi Nainggolan**

--RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)--  
LAPORAN PENELITIAN INDIVIDU

Puslit BKD-Setjen DPRRI

Jakarta

2018

## Pendahuluan

Serangan terorisme oleh para teroris pro-ISIS dari berbagai kelompok ke Kota Marawi, di Filipina Selatan, dan pendudukan kota tersebut hingga 5 bulan, telah menimbulkan korban tewas hingga 1.000 orang dan juga dampak sosial ekonomi yang besar bagi pemerintah dan rakyat Filipina. Serangan terorisme dan aksi pendudukan ini baru pertama kali terjadi di Asia Tenggara dan dikuatirkan oleh negara di kawasan ini akan menjadi model untuk dikembangkan oleh para simpatisan, pendukung dan pengikut ISIS di wilayah ini dalam upaya mewujudkan Kekhalifahan Asia Tenggara mereka. Karena itulah Malaysia, Indonesia dan Filipina telah menggalang kerja sama trilateral, selain bilateral seperti Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Filipina, untuk menggalangkannya. Telah diantisipasi, wilayah perbatasan terluar di ketiga negara itu mendapat ancaman secara langsung dari meningkatnya aktivitas aksi-aksi teroris di sana.

Pasca-Marawi, persoalan belum usai. Para pemimpin dan tokoh ISIS di pusat, terdapat sekitar 14 yang telah diidentifikasi berbahaya, seperti Abu Bakr al-Baghdadi, terus diwaspadai keberadaannya di Irak dan Suriah, dan wilayah Levant lainnya. Demikian pula, dengan keberadaan para pemimpin dan tokoh ISIS di kawasan Asia Tenggara, khususnya Filipina Selatan. Setelah direbutnya basis-basis strategis ISIS di pusat dan kawasan, dan belum tertangkapnya para pemimpin dan tokoh ISIS, pemerintah, terutama aparat keamanan dan militer di berbagai negara, terutama perbatasan, terus memantau dan sangat mewaspadaikan kabar dan mobilitas para pemimpin dan tokoh ISIS di pusat dan kawasan.

Eksistensi ISIS dewasa ini sangat ditakuti karena aktivitas mereka dalam terus menyebarkan ideologi terorisme dan memiliki kemampuan dalam melakukan propaganda untuk mencari simpatisan dan merekrut pengikut baru. Itulah sebabnya, para Menteri Pertahanan ASEAN (ASEAN Defense Ministers' Meeting --ADMM) merespons perkembangan situasi pasca-Marawi dengan melancarkan inisiatif berkumpul pada 7 Februari 2018 di Singapura. Acara yang mereka sebut sebagai *retreat*, dilakukan untuk membuat evaluasi serangan Marawi dan menyiapkan langkah antisipasi mencegah berulangnya serangan kelompok-kelompok teroris dan aksi pendudukan mereka untuk menguasai sebuah wilayah untuk merealisasikan tujuan politik jangka panjang mereka: membentuk sebuah Kekhalifahan Asia Tenggara. Gagasan dan cita-cita ini bukan hal baru,

karena telah dicanangkan di antara para pemimpin dan tokoh ISIS menjelang terdesaknya posisi mereka di pusat oleh perlawanan pasukan negara setempat dan koalisi negara luar. Ini sejalan dengan keputusan mereka dalam mengesahkan strategi *franchising* dengan mengizinkan langkah baru melakukan perlawanan di tempat masing-masing, termasuk kawasan, dalam hal ini Asia Tenggara.

Semakin meluasnya pengaruh kelompok-kelompok teroris pro-ISIS di Filipina Selatan, khususnya di perbatasan Malaysia-Filipina-Indonesia, akan membuat wilayah perairan maupun daratan di perbatasan ketiga negara itu akan mengalami proses destabilisasi keamanan. Hal ini disebabkan ancaman yang ditimbulkannya dan akan terganggunya aktivitas sehari-hari pemerintahan dan penduduk di pulau-pulau perbatasan terdepan. Kondisi pulau-pulau perbatasan yang serba terbatas di satu pihak, dan jauhnya jarak wilayah pulau-pulau itu dari jangkauan kontrol pusat, di pihak lain, membuat tidak mudah upaya untuk mencegah masuknya infiltrasi kelompok-kelompok teroris ke sana.

Pemimpin Kelompok Front Pembebasan Islam Moro (*Moro Islamic Liberation Front* -MILF), Murad Ibrahim, yang anggotanya di masa lalu pernah terlibat, tidak hanya dalam pemberontakan separatisme, namun juga aksi-aksi terorisme terhadap pemerintah dan rakyat Filipina, telah mengeluarkan peringatan langsung tentang stabilitas keamanan pasca-Marawi. Ia mengingatkan para loyalis (pengikut kelompok-kelompok teroris pro-) ISIS tetap berpotensi besar akan melakukan serangan terorisme ke kota-kota lain di Mindanao, antara lain Iligan dan Cotabato. Perkembangan ini juga didorong oleh konsolidasi kekuatan yang telah dilakukan Kelompok Maute, Kelompok Abu Sayyaf dan lain-lain, pasca-kejatuhan Kota Marawi dari pendudukan mereka.

Kelompok-kelompok teroris pro-ISIS di Filipina juga telah memiliki aset keuangan yang cukup hasil perampasan dari warga-warga kaya penduduk kota tersebut. Dengan demikian, mereka dapat melakukan perekrutan pengikut baru ke madrasah-madrasah dan universitas-universitas. Begitu pula, dari personil pendukung mereka, para teroris mantan kombatan dari Timur-Tengah (FTFs) asal berbagai negara, termasuk Asia, terutama Indonesia dan Malaysia, yang terus menyusup datang ke wilayah Filipina Selatan, untuk melanjutkan upaya mewujudkan cita-cita kekhalifahan global mereka. Sementara, lemahnya kontrol Pemerintah Duterte di pusat dalam memberantas terorisme dan mudahnya para pengikut kelompok-kelompok teroris pro-ISIS itu memperoleh senjata, menciptakan perpaduan atau kombiansi ancaman yang berbahaya, tidak hanya bagi

wilayah Filipina Selatan, tetapi juga bagi wilayah-wilayah negara di sekitarnya, khususnya perbatasan terdepan, terutama dengan Indonesia.

Peringatan BNPT mengenai bahaya kembalinya para teroris petempur asing (*Foreign Terrorist Fighters --FTF*) ke negara asal, terutama Indonesia, dengan jumlah pengirim yang banyak, menjadi *alarm* yang dapat membangkitkan kesadaran para pemimpin di Indonesia akan bahaya para teroris pro-ISIS membangun basisnya di Indonesia. Demikian juga, dengan peringatan kembalin beraksinya para narapidana (napi) teroris pro-ISIS, yang telah dilepas dari Lembaga Pemasyarakatan (LP), dalam berbagai serangan terorisme di berbagai daerah di tanah air. Perkembangan keadaan tersebut sudah seharusnya direspons oleh Pemerintah Indonesia dengan segera memetakan implikasi serangan terorisme dan pendudukan di Kota Marawi terhadap wilayah terdekat Indonesia dengan Filipina Selatan.

Penelitian ini bermaksud mengungkap dan menjelaskan apa dampak dari aktivitas dan aksi-aksi terorisme yang meningkat di ketiga perbatasan negara itu terhadap kondisi stabilitas keamanan pulau terdepan Indonesia di perbatasan ketiga negara tersebut, khususnya perairan Filipina Selatan. Juga, bagaimana dampak tersebut harus direspons Pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun pusat? Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Sifat penelitian ini adalah komprehensif dan analitis, yang berusaha mengungkap, membahas, dan menganalisis secara menyeluruh dan kritis. Analisis akan dilakukan secara sistematis, dengan subyek dalam penelitian ini adalah aparat keamanan dan pertahanan di Kodam, Polda, Korem, Polres, Kesbangpol, Binda, Pemprov dan Pemkab. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah ancaman stabilitas keamanan di pulau-pulau terdepan di perbatasan Indonesia dengan Filipina Selatan. Penelitian lapangan pertama akan dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara pada 13-20 Mei 2018. Sedangkan penelitian lapangan berikutnya akan dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara pada 10-17 September 2018.

## **TEMUAN PENELITIAN**

### **I. Peristiwa Marawi dan Eksistensi Kabupaten Nunukan**

Setelah aktivitas para pengikut, pendukung dan simpatisan ISIS/IS meningkat di Filipina Selatan, dengan munculnya pertempuran di Kota Marawi, wilayah di perbatasan

Filipina dengan dengan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kota Nunukan, juga diawasi ketat oleh aparat keamanan dan pertahanan Indonesia. Petugas Bea-Cukai dan Kepabeanan pun memeriksa dengan ketat barang-barang bawaan para TKI yang keluar-masuk, terutama menjelang Idul Fitri 25-26 Juni 2017, di pelabuhan internasional Tunon Taka. Tindakan ini untuk mengantisipasi dan mencegah keluar-masuknya barang-barang terlarang dari dan ke Indonesia, Malaysia dan Filipina, yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan para aktivis, pendukung dan simpatisan ISIS/IS di kawasan Asia Tenggara.

Kabupaten Nunukan adalah wilayah perbatasan (perairan) terdepan Indonesia dengan Malaysia, yang selama ini amat rawan dari berbagai aksi pembajakan kapal dan terorisme kelompok Abu Sayyaf yang telah berbaiat pada pemimpin ISIS/IS, Abu Bakr Al-Baghdadighdadi. Selama ini kegiatan pencarian biaya bagi aksi-aksi terorisme Kelompok Abu Sayyaf dengan aksi-aksi pembajakan kapal seringkali menggunakan wilayah perbatasan Malaysia-Indonesia- Filipina, sebelum para korbannya dibawa ke basis mereka di perairan Sulu, Filipina Selatan. Untuk merespons ancaman ini, pemerintah ketiga negara, khususnya Kemenhan dan militer mereka telah menggelar pertemuan di Tarakan, Kalimantan Utara, untuk menyusun *Memorandum Of Understanding* (MOU) pengamanan perairan perbatasan ketiga negara di dekat perairan Sulu, pada 19 Juni 2107.

Patroli angkatan laut ketiga negara telah diresmikan di atas KRI Dr. Suharso 990, di Tarakan. Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina memiliki kekuatiran besar, para teroris pro-ISIS yang bertempur di Kota Marawi akan memasuki wilayah sekitar perbatasan ketiga negara untuk melarikan diri, jika telah terdesak gempuran militer Filipina. Begitu pula sebaliknya, pemerintah ketiga negara telah mewaspadaai para pendukung dan simpatisan baru teroris pro-ISIS asal negeri mereka masing-masing dapat bergabung masuk ke Filipina Selatan untuk membantu rekan mereka bertempur di Kota Marawi melalui wilayah perbatasan darat dan laut. Di luar kerja sama trilateral baru itu, kerja sama bilateral yang telah ada, seperti patroli bersama Elang Malindo (Malaysia-Indonesia) dan Corpat Philindo (Filipina-Indonesia) tetap dilakukan secara rutin. Adapun Corpat Philindo, yang fokus pada patroli bersama angkatan laut kedua negara di perairan perbatasan Filipina Selatan dan pulau terluar Sulawesi, Indonesia, telah mencapai yang ke-XXX-17. Selain itu, terdapat pula Eastmincom, kerja sama TNI-AL dengan AL Filipina untuk patroli bersama di perairan kedua negara, termasuk di Teluk Davao-Filipina dan perairan perbatasan Indonesia-Filipina di Selat Sulawesi, hingga berakhir Pelabuhan Bitung, seperti

yang dijalankan pada 4-12 Juli 2017. Patroli Eastmincom ini tujuannya untuk mencegah masuknya para militan dari wilayah Indonesia bergabung dengan teroris pro-ISIS di Kota Marawi, ataupun sebaliknya, larinya para teroris pro-ISIS di Kota Marawi ke wilayah Indonesia.

Inisiatif dan kehadiran kerja sama trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina (Indomalphil) di tiga matra laut, darat dan udara ini, memberi dukungan yang signifikan bagi upaya rutin yang telah dilakukan selama ini dalam pengamanan laut di kawasan dari berbagai bentuk ancaman keamanan dalam konteks bilateral yang terbatas, misalnya, kerja sama Elang Malindo, antara Malaysia dan Indonesia, di matra udara. Belakangan keamanan perairan Sulu semakin terganggu oleh peningkatan aksi-aksi pembajakan kapal dan terorisme Kelompok Abu Sayyaf. Di samping itu, pihak Lanal Nunukan telah meningkatkan kemampuan alutsistanya, dengan menambah armada kapalnya dengan pengadaan kapal baru, yakni KAL Ambalat 1-13-45, yang bersandar di dermaga Nunukan.

Pengadaan alutsista ini menambah kekuatan Lanal Nunukan yang sudah ada selama ini, dengan KAL Bakori-nya, dengan kapasitas yang lebih kecil. Juga, dengan kehadiran KAL Ambalat, Lanal Nunukan diharapkan dapat merespons segala bentuk ancaman yang datang secara lebih baik dari aksi-aksi terorisme yang muncul kemudian, dan terhadap jenis-jenis kejahatan transnasional lainnya. Pengadaan KAL Ambalat bersamaan momennya dengan peningkatan alutsista Lanal Melonguane di Kabupaten Talaud dan Lanal Tahuna di Kabupaten Sangir. Tiga negara di perbatasan, baik Malaysia, Indonesia, maupun Filipina menghadapi peningkatan ancaman yang sama dari aktivitas terorisme di wilayah Filipina Selatan, termasuk perairan Laut Sulu, yang juga berdekatan wilayahnya dengan Kabupaten Nunukan dan Sebatik di bagian Indonesia.

Maraknya kegiatan penyelundupan barang, terutama narkoba dalam jumlah besar hingga ratusan ton asal China, yang masuk dari Malaysia ke Indonesia dan Filipina, telah meningkatkan kekuatiran Presiden Duterte di Filipina dan juga mitranya di Indonesia. Mereka prihatin terhadap kemungkinan dimanfaatkannya bisnis yang *lucratif* ini untuk membiayai aktivitas terorisme kelompok-kelompok teroris pro-ISIS/IS, termasuk dalam mewujudkan “Kekhalifahan Asia Tenggara ISIS/IS,” yang tengah mereka tunjukkan eksistensinya. Jika terjadi, hal ini meniru apa yang dilakukan Kelompok Taliban di Afghanistan untuk melanjutkan perjuangannya. Aparat keamanan di perbatasan telah mengingatkan perlunya mawaspadai dapat terjadinya perkembangan semacam ini di

perbatasan Malaysia-Indonesia yang melewati Kabupaten Nunukan di masa depan, mengingat begitu besarnya kasus-kasus narkoba yang sudah terungkap belakangan ini. Dalam tempo 3 bulan pertama di tahun 2016, misalnya, terdapat sebanyak 4,026 kilogram narkoba jenis sabu yang berhasil disita aparat.

KAL Ambalat ini dapat diandalkan dalam merespons segala bentuk ancaman atas SDA, terutama sumber daya ikan, serta keamanan dan kedaulatan RI di wilayah perbatasan, termasuk Karang Unarang di Ambalat, yang pernah diklaim dan diganggu AL Malaysia. Sebab, KAL Ambalat ini dilengkapi dengan senjata kaliber 20 dan 12,7 mm, dengan kecepatan 29-30 meter per detik dan mampu memuat personil sebanyak 15 orang. Perlengkapan senjata di kapal ini tentu saja dapat memberi efek penggentar bagi kapal-kapal pencuri ikan, penyelundup barang dan orang, serta para pembajak kapal dan teroris lintas-negara.

Di sisi lain, respons yang lebih maju aparat keamanan dalam mencegah dan merespons ancaman terorisme yang meningkat di akses keluar-masuk perbatasan Kabupaten Nunukan, yang selama ini rawan digunakan para pelaku atau pengikut aksi-aksi terorisme untuk melintas batas di kawasan Asia Tenggara ini, terutama kawasan Filipina Selatan, mulai tampak di lapangan. Ketika observasi lapangan dilakukan pada 4 Agustus 2017, di RT 05 Kelurahan Nunukan, misalnya, yang merupakan wilayah pintu perbatasan Malaysia-Indonesia yang ramai dan strategis, sudah ada Warung Kamtibmas, yang pembangunannya diinisiasi oleh Kapolsek KSKP Nunukan, beberapa bulan sebelumnya.

Pembangunan Warung Kamtibmas ini sangat maju dan positif sekali dalam perang total melawan terorisme internasional. Sebab, di 'warung', yang bangunannya lebih luas dari sebuah pos simkamling, dan nyaman, yang merupakan rumah bersama warga ini, masyarakat bisa berkomunikasi dan bertukar informasi mengenai perkembangan terkini di wilayahnya dengan sesama warga wilayahnya dan juga aparat kepolisian. Dari warung ini, upaya radikalisasi masyarakat oleh kelompok-kelompok radikal dalam masyarakat, apalagi yang sudah mulai tertarik atau menunjukkan simpatinya pada ISIS/IS, dapat dicegah dan direm. Karena, data semua warga ada di sini, termasuk tamu-tamu mereka dari luar, tercatat dengan baik, dan peringatan dini (*early warning*) pemerintah mengenai aktivitas kelompok-kelompok radikal dan aktivitasnya, terinformasikan secara lengkap. Demikian pula dengan upaya deradikalisasi masyarakat yang sudah mulai tercemar paham radikal, bisa dilakukan di sini. Sebab, pesan-pesan dari pemerintah dan aparat negara dapat

disampaikan secara langsung dan cepat dari tingkat terendah atau akar rumput (*grassroot*) ini. Sehingga, upaya penyebaran paham radikal dan mencari simpati bagi gerakan pro-ISIS/IS dapat ditangkal di rumah bersama warga ini, sebelum berkembang luas di masyarakat.

Upaya deradikalisasi melalui Warung Kamtibmas ini lebih murah dan mudah diwujudkan, karena semua dibiayai pembangunan dan (operasionalisasi) kegiatan sehari-harinya oleh masyarakat, daripada harus menunggu kesiapan dan kucuran dana pusat dari BNPT. Sehingga, upaya ini lebih bisa lebih cepat menangkal radikalisasi masyarakat dan mencegah aksi-aksi terorisme pro-ISIS/IS berikutnya. Demikian pula dengan pembuatan “Rumah Belajar,” yang memanfaatkan ruangan yang ada di Kantor Polsek KSKP Nunukan, dan para polisi berbagi waktu untuk mengajar secara sukarela, bagi warga sekitar pelabuhan Nunukan, khususnya yang tidak mampu dan tidak sekolah, dapat lebih jauh membantu upaya mencegah radikalisasi, dan sebaliknya memudahkan proses deradikalisasi masyarakat bawah. Karena, bagaimanapun, kondisi kemiskinan warga dan kurangpedulian pemerintah akan menyediakan lahan yang subur bagi berkembangnya radikalisme masyarakat dan ISIS/IS untuk memperoleh pendukung dan pengikutnya.

Jadi, jika pendirian Warung Kamtibmas dan Rumah Belajar dapat ditiru untuk dibangun minimal satu buah untuk setiap kelurahan, upaya ini akan membantu peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman terorisme dari bawah. Asumsinya tentu, semakin banyak berdiri semakin baik, untuk membantu masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada media sosial dalam memperoleh informasi, tetapi mau terus menjalin komunikasi melalui aktivitas tatap muka dan berdiskusi secara langsung dengan sesama warga dan aparat negara. Dalam target yang luas, jika upaya ini dapat diimplementasikan secara kontiniu, ia dapat menggagalkan niat para pengikut dan pendukung ISIS/IS untuk mendirikan kekhalifahannya di Asia Tenggara, sekaligus menghentikan aksi-aksi terorisme mereka.

## **II. Masuknya Para FTFs melalui Kabupaten Nunukan**

Bersamaan dengan kesiagaan di laut untuk menghadapi imbas serangan teroris pro-ISIS di Kota Marawi, di matra udara, militer Indonesia (Angkatan Udara) melakukan kesiagaan di lapangan dengan meningkatkan pengawasan. Patroli udara dilakukan TNI-AU dengan mengerahkan pesawat boeing 737 Patmar dari Skwadron Udara V dan Skwadron

Udara XI, serta pesawat tempur Sukhoi, yang temuannya di lapangan disampaikan ke AL dan melalui pos komando terkait. Dalam hal ini, Poskodol, Koopsau 2, Puskodal Armatim dan Puskodal TNI akan melakukan koordinasi, untuk kemudian ditindaklanjuti dan direspons di lapangan oleh TNI-AL.

Para pendukung dan pengikut ISIS dapat bergabung untuk bertempur bersama dengan rekan mereka di Kota Marawi melawan Pemerintah, khususnya militer, Filipina, baik dari wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia di Nunukan, maupun Kabupaten Sangir dan Kabupaten Talaud, melalui Pulau Marore dan Pulau Miangas. Mereka selama ini mengalir dan masuk ke ataupun keluar dari Filipina Selatan, di antaranya dari wilayah Poso dan Toli-Toli di Sulawesi Tengah. Dari kasus terkini, di wilayah Toli-Toli ini, sebanyak 9 orang telah ditangkap, karena telah terdeteksi mengirimkan FTFs asal Indonesia untuk bergabung dengan teroris ISIS di Kota Marawi pada bulan Mei 2017. Kemudian, ada juga 1 orang telah ditangkap di Kediri dan 3 orang di Jambi, dan 1 orang di Tangerang Selatan.

Bahrumsyah, tokoh ISIS asal Indonesia, yang masih melakukan aktivitas terorisme di Suriah, telah mengorganisasi pengiriman FTFs asal Indonesia ini, dengan memanfaatkan dan menyalahgunakan dana-dana untuk kegiatan kemanusiaan yang digalang pengumpulannya di Indonesia. Adapun para anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Al-Hawariyun aktif mengirimkan anggota dan simpatisan mereka ke wilayah Filipina Selatan, setelah pengiriman ke Suriah, untuk melakukan aksi-aksi terorisme pro-ISIS mereka. Sementara itu, selama ini, Bahrumsyah dikenal sebagai tokoh pendiri Katibah Nusantara, sel dan cikal bakal (Kekhalifahan) ISIS di Asia Tenggara.

Sementara itu, Reza Nurjamil telah ditangkap oleh aparat Densus 88 pada 31 Desember 2017 di Nunukan, karena aktivitasnya menyalurkan orang-orang dari Indonesia untuk berjihad dan menjadi FTFs bersama kelompok Abu Sayyaf dan Maute dan lain-lain di Filipina Selatan. Reza terlibat sebagai fasilitator yang telah memberangkatkan sejumlah orang Indonesia (WNI) untuk *berjihad* ke Kota Marawi, Filipina Selatan. Sebelum dikirim, WNI itu diindoktrinasi dulu oleh Reza dan kelompoknya. Reza terungkap sebagai anggota jejaring JAD di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Langkah penyidikan lebih jauh aparat keamanan mengungkap kedudukan Reza Nurjamil berperan sebagai 'Panitia Hijrah' untuk Filipina, dengan wilayah tugas Pos 2 Nunukan. Posisinya termasuk sebagai aktor penting, mengingat sebanyak 12 orang WNI telah dibawa masuk ke Mindanao, Filipina Selatan, untuk bergabung dengan kelompok-

kelompok teroris di sana dan pergi ber*jihad*. Nunukan, dan juga Sebatik, belakangan teridentifikasi sebagai daerah strategis untuk memasukkan teroris dari wilayah Indonesia ke perbatasan Malaysia di Tawau dan Mindanao di Filipina Selatan. Para calon teroris tampaknya direkrut oleh Reza dan kelompoknya secara langsung, dengan proses tatap muka yang persuasif, melalui jaringan berstruktur.

Sementara itu, di masa lalu, awal tahun 2000-an, masih di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yang dulu masih bersatu dengan Provinsi Kalimantan Timur, di wilayah Kota Tarakan, pernah terdata tinggal seorang anggota Jamaah Islamiyah (JI), yakni M. Syahrir Ambal. Kegiatannya terkoneksi dengan kelompok pesantrennya, dengan pengikut sekitar 30 orang, yang pada tahun 2002 telah membubarkan diri. Anakanya, Fadlan Akbar, dan juga cucunya, diduga telah berangkat ke Suriah, melalui Kota Tawau, Malaysia, untuk bergabung dengan ISIS. Sedangkan anak ketiga M. Syahrir Ambal, yaitu Furqon Haaq, telah dipenjarakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hubungannya dengan kasus pemboman. Jadi, sejauh ini, dari catatan dan data aparat berwenang, mereka dan organisasi yang pernah ada terkoneksi dengan jejaring kelompok militan/radikal dan terorisme pro-ISIS dari wilayah Provinsi Kalimantan Utara, memang masih minim.

### **III. Ancaman di Perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe**

Untuk merespons eskalasi konflik di Filipina Selatan akibat serangan dan pendudukan kelompok-kelompok teroris pro-ISIS di Kota Marawi, aparat berwenang, termasuk Imigrasi dan TNI-AL di perbatasan Indonesia-Filipina, telah melakukan peningkatan pengawasan terhadap WNI, WN Filipina, dan WNA lain yang keluar-masuk wilayah kedua negara. Langkah pengawasan dan pemantau lebih ketat dilakukan oleh aparat keamanan dan pertahanan Indonesia terhadap penduduk yang menggunakan jalur laut di *Border Crossing Station* (BCS) di Pulau Marore dan Pulau Miangas. Pengawasan khusus dilakukan aparat terhadap warga yang telah dicurigai kedatangan, kepergian dan aktifitasnya memiliki hubungan dengan jejaring teroris di Filipina Selatan. Orang-orang yang dicurigai ini bisa juga yang berasal dari Jawa dan wilayah lainnya Indonesia, seperti Poso dan lain-lain.

Untuk merespons eskalasi konflik dan ancaman terorisme yang meningkat dari wilayah (perairan) Filipina Selatan, TNI-AL telah membentuk Tim EFQR (*East Fleet Quick Response*) atau Tim Khusus Reaksi Cepat dari Armada Timur. Di wilayah perairan, terutama

sekitar perbatasan, TNI-AL melakukan penambahan gelar operasi kapal-kapal, baik memakai KRI maupun kapal-kapal milik pemerintah lainnya, untuk melaksanakan patroli maritim, mengawasi kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia dari wilayah ZEE yang berbatasan dengan perairan Filipina Selatan, termasuk Laut Sulu, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Langkah ini dilakukan untuk mencegah masuknya kelompok-kelompok militan dan pengikut baru teroris pro-ISIS dari wilayah Indonesia ke Filipina (Selatan), dan sebaliknya. Bersama aparat pemerintah lainnya, TNI-AL mendukung pembuatan pos-pos terpadu di masyarakat, terutama di BCS di wilayah perbatasan, Posal-posal dipulau-pulau terdepan, yang dapat digunakan sebagai akses alternatif oleh para pelintas-batas, dalam rangka membangun dan memperkuat *early warning system*.

Hasilnya, Posal Marampit dan Petta, pada 12 Agustus 2017, telah menangkap dan memeriksa 6 WN Filipina, yang 1 orang di antaranya, Marvin Sono Luzorata, yang identitasnya terkait dengan MNLF, SRSF (*Special Regional Security Forces*), dan NESU (*National Elne Security Unit*). Kemudian, pada 11 Nopember 2017, Tim Intelijen EFQR VIII dan Satgas Trisula 17 telah menangkap dan memeriksa Diki Maenaki (Abu Mushab) di dalam kapal cepat Express Bahari 2, yang menggunakan rute Manado-Tahuna. Abu Mushab ditemukan sebagai simpatisan ISIS yang bermaksud melakukan perjalanan ke Filipina Selatan, untuk bergabung dengan kelompok-kelompok teroris pro-ISIS, melalui jalur laut dari Manado ke Tahuna (Sangihe).

Di samping itu, TNI-AL melakukan penambahan aparat yang bertugas dalam Satgas Intelijen untuk mendukung peningkatan operasi intelijen untuk mengawasi dan memantau pergerakan teroris. Para teroris yang diawasi adalah mereka yang menggunakan wilayah perairan dan akses keluar-masuk dari pelabuhan tradisional dan pelabuhan tikus yang terdapat di wilayah terdepan, yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, yakni di Pulau Tinakareng dan Pulau Petta. Pengawasan khusus dilakukan di wilayah-wilayah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian dan latihan perang teroris. Aparat juga melaksanakan razia bahan-bahan kimia yang bisa dipakai sebagai bahan peledak dan untuk membuat bom, ke toko-toko dan tempat-tempat penduduk.

#### **IV. Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Akses Masuk**

Secara geografis, letak Kabupaten Kepulauan Sangihe jauh lebih mudah dijangkau oleh para pengikut ISIS, dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Kepulauan Miangas,

mengingat banyak pulau kecil yang berjajar di wilayah kabupaten ini yang berbatasan dengan wilayah perairan Filipina (Selatan). Di samping itu, di salah satu kabupaten terluar/terdepan Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara ini, juga jauh lebih banyak terdapat pelabuhan tradisional (pelabuhan tikus) yang dapat dijadikan akses keluar-masuk para FTFs dari dan keluar wilayah Indonesia menuju Filipina, atau sebaliknya. dari dan keluar wilayah Filipina menuju Indonesia. Juga, hambatan alam, seperti cuaca dan ombak besar dan kondisi pantainya yang jauh lebih landai dan baik, membuat wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe jauh lebih mudah dicapai oleh para FTFs untuk datang atau keluar dari wilayah Filipina Selatan, yang tengah dibangun sebagai basis Kekhalifahan ISIS di Asia Tenggara.

Bukanlah hal yang mengejutkan, hasil pengungkapan aparat berwenang di Filipina mengungkapkan bahwa Mushalla alias Abu Umar, narapidana teroris yang baru saja bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas/LP) Cirebon, telah tertangkap di wilayah Filipina Selatan, setelah bergabung dan melakukan aktifitas dengan kelompok-kelompok teroris pro-ISIS di sana. Berdasarkan informasi aparat berwenang Filipina dan penyelidikan lebih lanjut aparat berwenang Indonesia, terungkap lebih jauh bahwa Mushalla telah menggunakan akses pintu keluar di pelabuhan di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan negara Filipina, untuk menyeberang masuk ke wilayah Filipina Selatan. Hal ini juga mengungkapkan bahwa mantan narapidana teroris tersebut telah melewati banyak tempat di wilayah kabupaten kepulauan ini, sebelum melewati perbatasan kedua negara dan dapat masuk ke wilayah negara Filipina.

Dari catatan dan dokumen perjalanan yang telah digunakan Mushalla dan berhasil dilacak aparat berwenang Indonesia terungkap pula bahwa mantan narapidana teroris yang kemudian melakukan kembali aktifitas terorismenya itu terakhir berangkat menggunakan akses pelabuhan dan wilayah Sangihe pada 2 Maret 2018, sekitar 3 minggu sebelum *field research* dan wawancara ini dilakukan. Bagi aparat keamanan Indonesia, hal ini menimbulkan kekuatiran baru, sebab kasus Mushalla ini mengartikan gagalnya pelaksanaan program deradikalisasi teroris di dalam Lapas. Demikian pula, hal itu menunjukkan lemahnya pengawasan aparat berwenang, atau aparat keamanan dan penegak hukum, khususnya aparat anti-teroris, dalam mengawasi aktifitas dan pergerakan para narapidana teroris (napiter) melalui wilayah perbatasan, termasuk di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dilihat dari perspektif demografis, sama halnya dengan di Kabupaten Kepulauan Miangas, karena mayoritas penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Katholik, para simpatisan, pendukung dan pengikut kelompok-kelompok teroris pro-ISIS sulit mencari, apalagi membangun basis kekuatannya di sana. Karena kondisi demografis yang tidak kondusif itu, sulit bagi aktifis ISIS melakukan berbagai aktifitas terorisme dan membuat basis baru di sana. Sementara itu, ratusan keluarga keturunan Sangihe yang telah lama bermigrasi dan menetap di wilayah Filipina Selatan ini sering pergi ke pulau-pulau di perbatasan Kabupaten Sangihe untuk mencari ikan dan mengunjungi keluarga-keluarga mereka, dengan berlayar menggunakan kapal-kapal kecil berukuran 1 GT, dengan muatan 6 sampai 7 orang. Sekalipun demikian, di antara mereka, belum ada yang ditemukan telah bergabung atau terlibat aktifitas dengan kelompok-kelompok teroris di sana, seperti Kelompok Abu Sayyaf, Maute dan lain-lain.

Mereka yang sering disebut sebagai 'sapi pisan' –untuk mengidentifikasi mereka yang keturunan Indonesia-Filipina, atau sebaliknya, Filipina-Indonesia, ratusan keluarga jumlahnya dan tidak mempunyai dokumen kependudukan Filipina ataupun Indonesia. Latar belakang mereka yang Katholik membuat mereka tidak dapat sepaham untuk mendukung ideologi dan aktifitas terorisme kelompok-kelompok teroris pro-ISIS. Karena sikap mereka yang menguntungkan posisi Indonesia ini, termasuk untuk turut menjaga keamanan di sekitar wilayah perbatasan Indonesia-Filipina, khususnya terkait dengan kebijakan kontra-terorisme, Pemerintah Indonesia bermaksud menawarkan pemberian KTP bagi mereka.

Dari kasus yang pernah dijumpai di lapangan oleh aparat pemerintah Indonesia, para pendatang dari luar wilayah Filipina Selatan menggunakan wilayah Indonesia di Kabupaten Kepulauan Sangihe hanya untuk mengikuti kegiatan silaturahmi agama secara rutin, berupa *dakwah*, untuk memberikan pelajaran agama bagi penduduk di sana. *Jamaah tabligh* ini yang datang ini termasuk yang berasal dari Indonesia, Pakistan, India dan lain-lain. Sehingga, bukanlah sebuah kebetulan, pada waktu terjadinya aksi serangan terorisme dan pendudukan oleh Kelompok Maute yang pro-ISIS, juga telah dijumpai adanya puluhan orang anggota kelompok *jamaah tabligh* asal Indonesia yang terperangkap di sana.

Dengan faktor demografis yang demikian, berbeda sekali dengan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, logis saja, tidak ditemukan sel-sel tidur teroris di kalangan penduduk atau masyarakat setempat. Bahkan, kelompok-kelompok masyarakat Muslim

atau yang telah dikategorikan sebagai pengikut agama yang berpandangan ekstrimis, dengan cita-cita mewujudkan *khilafah*, dan menegaskan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti HTI, tidak dijumpai di wilayah kabupaten kepulauan ini. Keberadaan aparat, berkat masih dipertahankannya fungsi teritorial, Tentara Nasional Indonesia (TNI), turut menyulitkan kelompok-kelompok radikal atau ekstrim ini hidup dan berkembang di masyarakat, termasuk yang menggunakan akses melalui berbagai wilayah kabupaten kepulauan ini.

Keberadaan kawasan perairan di Sangihe, juga lebih menyulitkan kelompok-kelompok teroris untuk bisa lalu-lalang ke Filipina Selatan dengan mudah, tanpa terpantau aparat keamanan dan pertahanan Indonesia. Sedangkan di wilayah perbatasan darat, kelompok-kelompok teroris lebih mudah keluar-masuk Indonesia untuk menuju Filipina Selatan, atau sebaliknya, karena jauh lebih sulit diawasi gerak-gerik mereka oleh aparat di wilayah perbatasan darat yang jauh lebih luas, dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar. Tidaklah mengherankan, wilayah Nunukan, Sebatik, Tawau dan lain-lain dan sekitarnya, yang berbatasan dengan perbatasan darat yang luas dengan Malaysia dan Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara menjadi jauh lebih rawan kondisinya untuk disusupi para aktifis dan pengikut teroris pro-ISIS kelompok Abu Sayyaf dan lain-lain. Sementara, patroli perbatasan bersama di perairan oleh aparat AL Filipina dan Indonesia, yang terus dijalankan sejak tahun 1975, melalui *Joint Border Agreement* (JBA), semakin menyulitkan para teroris untuk menyusup, apalagi dengan kondisi cuaca dan medan yang seringkali kurang bersahabat.

## **V. Keterbatasan Kapasitas Aparat**

Seperti halnya di perbatasan Filipina Selatan dengan Kabupaten Kepulauan Miangas, di perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe, aparat keamanan dan pertahanan Indonesia menghadapi persoalan dengan kapasitas dan daya dukung alutsista untuk dapat merespons ancaman terorisme internasional secara lebih baik. Aparat Lanal, sebagai contohnya, belum memiliki pelabuhan tersendiri bagi tempat bersandar, persiapan operasi dan pemeliharaan kapal-kapalnya. Selama ini kapal-kapal yang ada menumpang bersandar di pelabuhan umum, sehingga rawan dari ancaman sabotase, selain tidak cepat, efisien dan efektif untuk mendukung dan melaksanakan operasi, mengingat mereka harus berbagai pelayanan dengan kapal-kapal angkutan umum di pelabuhan.

Luas pelabuhan umum di atas juga terbatas dan kondisinya amat dipengaruhi oleh cuaca dan rintangan alam yang berat bagi kapal-kapal Lanal dan dari luar untuk masuk dan bersandar bagi keperluan mengisi bahan bakar dan logistik. Sehingga, pembangunan pelabuhan atau dermaga baru yang lebih luas dan memadai, yang khusus melayani kebutuhan operasional TNI-AL dalam menjaga keamanan dan kedaulatan perairan Indonesia di sepanjang pantai di perbatasan Indonesia-Filipina, terutama di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, menjadi tidak terelakan. Sebagai alternatifnya adalah membangun sebuah pelabuhan baru untuk Lanal Sangihe, yang antara lain, pilihannya ada di Pulau Tinakareng.

Selain lebih dekat dan strategis ke pintu perbatasan terdepan, keberadaan pelabuhan di Pulau Tinakareng akan lebih baik, karena tidak akan terlalu banyak menghadapi hambatan cuaca dan alam. Dengan kata lain, letak dan kondisinya jauh berbeda dengan di pelabuhan di Tahuna, dan sangat ideal bagi TNI-AL dalam mendukung operasi kapal-kapal TNI-AL yang bertugas mengawasi dan melindungi wilayah perbatasan secara rutin dari hari ke hari, sepanjang tahun, dari berbagai ancaman yang datang, khususnya terorisme internasional. Keberadaan sebuah pelabuhan baru di Pulau Tinakareng akan memberikan akses yang lebih mudah bagi kapal-kapal TNI-AL untuk jauh lebih cepat bisa menjangkau wilayah perairan pulau-pulau terdepan milik Indonesia di perbatasan Filipina (Selatan), yakni Pulau Marore dan Pulau Marampit.

Realitas di lapangan selama ini menunjukkan, wilayah tanggung jawab Lantamal VIII Sulawesi Utara berhadapan langsung dengan wilayah perairan yang rawan dari aktifitas terorisme kelompok-kelompok teroris pro-ISIS, khususnya Kelompok Abu Sayyaf (*Abu Sayyaf Group* –ASG), di perbatasan Indonesia dengan Filipina Selatan dan Laut Sulu. Sedangkan di kawasan bawahnya terletak wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah dengan penduduk yang konservatif, yang selama ini dikenal pula sebagai ‘daerah keras’ atau ‘panas’. Adapun Poso di Provinsi Sulawesi Tengah selama ini menjadi basis perlawanan pengikut Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di bawah kepemimpinan Santoso, yang telah berbaiat kepada ISIS. Sedangkan jalur udara dan perairan Palu-Balikpapan telah terdeteksi amat efisien digunakan selama ini oleh para teroris untuk keluar-masuk menuju Nunukan, sebelum mereka menyeberang ke Malaysia, untuk selanjutnya ke wilayah Filipina Selatan.

Provinsi Sulawesi Utara yang menjadi wilayah kerja Lantamal VIII adalah kawasan transit para teroris, calon teroris, simpatisan ISIS dan FTFs asal berbagai negara yang keluar dan masuk ke sarang atau basis Kekhalifahan Asia Tenggara ISIS di Filipina Selatan. Kalangan TNI-AL di Lantamal VIII mengingatkan, basis ISIS Asia Tenggara itu ada di Filipina. Mengenai resikonya yang berbahaya bagi keamanan domestik Indonesia dan regional di sekitarnya dapat dipahami mengingat kedekatan wilayah kerja Lantamal VIII dengan negara tetangga Filipina, yang telah dijadikan basis ISIS tersebut. Selain menjadi penting secara geografis, wilayah provinsi Sulawesi Utara ini, sebagai konsekuensinya, menjadi sangat strategis dari perspektif geopolitik dan geoekonomi. Wilayah perairan sekitar Laut Sulu dan Laut Pasifik ini menjadi sangat penting secara geo-ekonomi, karena kekayaan SDA dan perkembangan dinamis ekonomi negara-negara sekitarnya.

Saat Peristiwa Marawi terjadi di tahun 2017, aparat Polda Sulawesi Utara menggelar 'Operasi Aman Nusa' 1-3, untuk mengamankan wilayah mereka dari dampak limpahan aktifitas teroris kelompok-kelompok pro-ISIS di sana. Kewaspadaan aparat kepolisian di Polsek-Polsek garis terdepan ditingkatkan, dengan secara simultan mengirim dan menggelar pasukan Brimob, terutama di Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud, yang penulis saksikan sendiri di lapangan. Pasukan Brimob tersebut secara rutin melakukan patroli di tengah-tengah pemukiman penduduk dan menyisir wilayah pesisir dengan berjalan kaki dalam formasi beregu dan siap tempur.

Dalam 'Operasi Aman Nusa' 1, aparat kepolisian Sulawesi Utara tidak memperoleh temuan yang berarti. Barulah ketika 'Operasi Aman Nusa'2 digelar, aparat kepolisian di Manado, berdasarkan informasi intelijen dari pasukan anti-teroris Densus 88, berhasil mencegah dan menangkap Abu Mushab, pada 11 Nopember 2017, yang akan berangkat ke Filipina Selatan, untuk bergabung dengan kelompok-kelompok teroris pro-ISIS. Kegiatan mencegah dampak limpahan Peristiwa Marawi dan penerapan darurat militer oleh Pemerintah Duterte di sana, juga dilakukan aparat Polda Sulawesi Utara dengan operasi intelijen dan kamtibmas terpadu, sebagaimana yang dilakukan aparat kepolisian Kabupaten Kepulauan Nunukan dengan pendirian 'Warung-warung Kamtibmas' mereka, dengan melibatkan langsung masyarakat.

Jajaran Polda Sulawesi Utara menyadari, Tahuna-Manado-Palu-Poso adalah rute alternatif para pengikut teroris pro-ISIS dari dan keluar wilayah Indonesia menuju dan

meninggalkan wilayah Filipina terkait aktifitas terorisme mereka. Hasilnya, di tahun 2017, aparat Polda Sulawesi Utara, berkoordinasi dengan aparat TNI-AL dan aparat negara lainnya, seperti Imigrasi dan lain-lain, berhasil menangkap 6 orang WN Filipina, yang baru tiba di wilayah provinsi ini, yang seorang di antaranya memiliki identitas sebagai pengikut MNLF. Sementara, di rute favorit para teroris asal Indonesia, yakni jalur Nunukan-Sebatik-Tawau-Tawi-tawi, aparat kepolisian Provinsi Kalimantan Utara berhasil mencegah dan menangkap mereka yang berusaha merekrut dan para pengikut baru teroris pro-ISIS, yang berhasil direkrut dari wilayah Indonesia dan Malaysia, yang akan dibawa ke Filipina Selatan, untuk mendukung dan melanjutkan perlawanan rekan-rekan mereka.

## **VI. Kesimpulan**

Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah 2 wilayah daratan yang terletak di wilayah perbatasan terluar Indonesia dengan negara-negara tetangga Malaysia dan Filipina, yang selama ini amat rawan dari lalu-lintas para aktor non-negara yang terlibat dalam aktivitas terorisme internasional. Kedua wilayah itu menjadi rawan dari ancaman terorisme internasional yang selama ini memakai kawasan Filipina Selatan, terutama Kepulauan Mindanao dan Laut Sulu, sebagai basis operasi mereka. Wilayah tersebut mudah digunakan sebagai akses keluar-masuk para pengikut, pelaku, pendukung maupun simpatisan kelompok-kelompok teroris pro-ISIS asal Indonesia, Malaysia, dan Filipina maupun apa yang diidentifikasi sebagai FTFs dari negara-negara lain, termasuk asal Uighur (China) dan Timur-Tengah. Kesamaan latar belakang ras, agama, etnik, bahasa, cara hidup, tradisi dan kultur warga menyebabkan wilayah kedua kabupaten di perbatasan terluar Indonesia itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang telah dideklarasikan sebagai wilayah “Kekhalifahan Asia Tenggara” atau “Divisi Timur Jauh” ISIS, yang lahir di Timur-Tengah, terutama teritori Suriah dan Irak.

Kondisi garis pantainya yang panjang di daratan dari kedua kabupaten tersebut telah menyediakan banyak pelabuhan tradisional untuk dilewati dan disinggahi, dan jalan-jalan tikus untuk dilewati. Sulitnya pengawasan atas pelabuhan-pelabuhan tradisional dan jalan-jalan tikus di sana, serta keterbatasan aparat keamanan dalam memantau setiap pergerakan dan perkembangan lalu-lintas manusia di kedua wilayah kabupaten itu membuat para aktor non-negara yang terlibat dalam aktivitas terorisme internasional ini leluasa, dan bahkan bisa berulang kali, memanfaatkan berbagai akses

yang tersedia di jalur pelintasan ini untuk mendukung tujuan mereka. Kerawanan ini ditambah lagi oleh keterbatasan jumlah aparat yang bertugas di lapangan dan alutsista yang tersedia, serta keterbatasan pengetahuan dan informasi aparat di lapangan mengenai pergerakan dan perkembangan para pelaku terorisme internasional.

Kondisi stabilitas keamanan di wilayah kedua kabupaten yang dijadikan obyek penelitian belum terganggu. Tetapi, potensi radikalisme dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan kecenderungan meningkatnya konservatisme beragama dan intoleransi dalam masyarakat di tingkat nasional belakangan ini. Terlepas dari ini, kondisi konservatisme beragama dan intoleransi di Kabupaten Nunukan lebih tinggi dibandingkan dengan di Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara. Memang, kedua wilayah kabupaten tersebut hanyalah sampel dari beberapa wilayah lainnya di perbatasan terluar, namun gambaran umum yang penulis peroleh dari penelitian lapangan di beberapa wilayah perbatasan terluar menggambarkan kecenderungan meningkatnya konservatisme beragama dan sikap intoleransi di masyarakat mereka. Sementara itu, harus disadari, apapun perkembangan yang sedang berlangsung, hal itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pengawasan aparat, terutama terhadap aktivitas beragama dan lalu-lintas orang di perbatasan orang yang melanggar hukum harus terus dijalankan dan ditindaklanjuti dengan penegakan hukum, secara konsisten dan kontiniu.

Rawannya wilayah perbatasan dari aktivitas para pelaku, pengikut dan pendukung terorisme internasional sejak dulu hingga sekarang terlihat dengan tertangkapnya mereka oleh aparat keamanan lintas-instansi dalam operasi di lapangan, termasuk pemeriksaan di pos-pos perbatasan, yang dibantu oleh pelaksanaan operasi intelejen yang baik. Tidaklah mengherankan mereka para pelaku dan pengikut gerakan teroris, khususnya yang pro-ISIS dari generasi baru, dapat ditangkap, seperti yang berhasil dilakukan aparat terhadap yang ingin menyeberang ke Filipina Selatan dengan menggunakan jalur perairan Provinsi Sulawesi Utara. Jika koordinasi antar-aparat terkait dapat ditingkatkan dan dilakukan lebih baik, tentu tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih baik lagi, dengan kemungkinan sukses penangkapan para pelaku dan pengikut terorisme lebih banyak lagi!

Kemampuan operasi intelijen aparat keamanan Indonesia, baik di kalangan Polri maupun TNI, khususnya aparat anti-teroris, yang masih terbatas, namun menjadi tulang punggung dalam penanggulangan ancaman terorisme internasional, dan kemampuan koordinasi di antara mereka yang masih harus ditingkatkan, menambah daftar pekerjaan

rumah yang harus diselesaikan. Pembangunan dan perbaikan dalam pembuatan *database* pelaku terorisme dan perkembangan aktivitas mereka adalah prasyarat utama untuk bisa sukses dalam pelaksanaan operasi intelijen di masa depan. Secara khusus, eksistensi, peran dan kinerja intelijen sipi, mereka yang bekerja di bawah institusi Badan Intelijen Nasional (BIN) dalam penanggulangan ancaman terorisme internasional di Indonesia, harus ditingkatkan.

Selanjutnya, untuk mengatasi keterbatasan kemampuan dalam operasi anti-terorisme internasional di kawasan, terutama perbatasan, kerja sama antar-negara, terutama Indonesia-Malaysia dan Filipina, menjadi penting untuk ditingkatkan. Kerja sama ini bisa dikembangkan antara aparat kepolisian dan militer ketiga negara di setiap matra, terutama darat dan laut, yang sering digunakan sebagai akses keluar-masuk para pelaku terorisme internasional di kawasan. Untuk lebih optimal, kerja sama intelijen bisa dikembangkan dengan negara-negara sekitar dan negara lain, yang sudah jauh lebih maju *database* intelijen mereka mengenai perkembangan ancaman dan pelaku serta jejaring teroris internasional dewasa ini. Hanya dengan dengan upaya ini Indonesia dapat selalu sukses dalam penanggulangan ancaman terorisme internasional, yang bisa muncul etiap saat, dalam jangka panjang.

-----